

BAB II

GAMBARAN UMUM GERAKAN PEREMPUAN DI INDONESIA DAN KAMPANYE ANTI KEKERASAN OLEH KOMNAS PEREMPUAN

2.1 Sejarah Perkembangan Gerakan Perempuan di Indonesia

Gerakan perjuangan perempuan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan konteks sejarah, sosial, politik dan budaya dalam masyarakat. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi terbentuknya kesadaran perempuan Indonesia, Pertama, pengaruh pendidikan dari pemerintah kolonial melalui kebijakan politik etis pada awal abad ke-20 memberikan kesempatan bagi sebagian perempuan pribumi untuk mendapatkan pendidikan formal di sekolah-sekolah modern. Pendidikan formal ini memperluas wawasan perempuan Indonesia tentang dunia luar, hak asasi manusia, demokrasi, nasionalisme, hingga feminisme. Pada periode yang sama, banyak organisasi perempuan yang dibentuk untuk memperjuangkan nilai-nilai bermasyarakat, mempertahankan budaya asli dan menolak aspek-aspek kebudayaan barat yang dianggap bertentangan dengan masyarakat (Kompas, 2020).

Kedua, adanya pengaruh dari gerakan nasional yang berkembang sejak akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20 yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti K.H Dewantara, Dr. Soetomo, M. Hatta, Soekarno, dan lainnya. Gerakan inilah yang kemudian membangkitkan semangat perlawanan terhadap penjajahan dan aspirasi untuk merdeka, tidak terkecuali dari perempuan-perempuan Indonesia khususnya yang terlibat dalam organisasi. Beberapa organisasi yang muncul pada periode tersebut adalah Poetri Mahardika yang didirikan dengan tujuan meningkatkan pendidikan dan kesadaran politik, serta Kongres Perempuan (1928)

yang merupakan persatuan kelompok perempuan dari berbagai daerah guna memperjuangkan hak-hak perempuan dalam agenda kemerdekaan.

Pengaruh lainnya adalah berkembangnya gerakan perempuan dalam skala internasional sejak akhir abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20. Gerakan ini dipicu oleh berbagai peristiwa penting seperti Revolusi Industri, Perang Dunia I dan II, *Suffrage Movement*, *Women's Liberation Movement* dan lain-lain. Dalam skala besar, gerakan-gerakan perjuangan perempuan tersebut menuntut kesetaraan gender dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Pengaruh yang diberikan dari gerakan perempuan internasional pada perempuan Indonesia tersalurkan melalui media massa, literatur, serta pertemuan-pertemuan regional dan global antar kelompok. Selain gerakan tersebut, dalam sejarah Indonesia, sudut pandang dan perjuangan perempuan sejatinya tidak terlepas dari sejarah kebangsaan Indonesia, karena munculnya tokoh-tokoh perempuan dan dibentuknya berbagai kelompok perjuangan difokuskan untuk mencapai kemerdekaan bangsa (Fauzia, 2022).

Sebelum kemerdekaan, gerakan perjuangan perempuan Indonesia masih dalam bentuk peperangan perempuan untuk melawan kolonialisme. Kemudian, bentuk gerakan perempuan dilaksanakan dengan cara lain untuk memperjuangkan hak-hak dari perempuan serta kesetaraan perilaku yang diberikan antara perempuan dan laki-laki di masyarakat. Bersamaan dengan pengaruh barat, organisasi perempuan juga berupaya mencapai tujuan mereka memperjuangkan nilai-nilai dalam keluarga dan masyarakat Indonesia agar mampu mempertahankan budaya asli dan menolak aspek-aspek kebudayaan barat yang dianggap bertentangan

dengan masyarakat. (Fauzia, 2022). Kontribusi lain dari gerakan perjuangan perempuan demi tercapainya kemerdekaan Indonesia terdapat pada kesadaran politik dan nasionalisme untuk melaksanakan literasi, diskusi, dan demonstrasi, memberikan dukungan material seperti dana, makanan, pakaian, dapur umum, rumah sakit lapangan, hingga sekolah darurat.

2.2 Gambaran Momentum 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Secara Global

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (K16HAKTP) merupakan kampanye internasional yang diselenggarakan untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia dan pertama kali digagas oleh Women's Global Leadership Institute pada tahun 1991. Secara global, lebih dari 3.700 organisasi yang berasal dari kurang lebih 164 negara berpartisipasi dalam kampanye 16 HAKTP setiap tahun. UN Women, yang merupakan bagian dari PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) akhirnya mengadopsi kampanye tersebut untuk disosialisasikan secara global karena masalah kekerasan terhadap perempuan dirasa sudah terlalu lama menjadi impunitas. Untuk memperjelas aksi ini, Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dikeluarkan Majelis Umum PBB pada tahun 1993 dengan mendefinisikan kekerasan perempuan sebagai “setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang menghasilkan, memungkinkan, dan mengakibatkan kekerasan dalam bentuk fisik, seksual, psikologis, atau penderitaan terhadap perempuan”.

Setiap tahunnya, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 November yang diperingati sebagai Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap

Perempuan, dan berakhir pada tanggal 10 Desember, yang merupakan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional. Pemilihan periode 25 November sampai 10 Desember ditujukan secara simbolis untuk menghubungkan kekerasan terhadap perempuan sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM. Selain itu, dalam rentang waktu 16 hari tersebut, diperingati juga untuk peristiwa-peristiwa lain, yakni 29 November sebagai Hari Perempuan Pembela HAM, 1 Desember sebagai Hari AIDS Sedunia, 2 Desember sebagai Hari Internasional untuk Penghapusan Perbudakan, 3 Desember sebagai Hari Internasional bagi Penyandang Disabilitas, 5 Desember sebagai Hari Internasional bagi Sukarelawan, 6 Desember sebagai Hari Tidak Ada Toleransi bagi Kekerasan terhadap Perempuan, dan 9 Desember sebagai Hari Perempuan Pembela HAM Sedunia.

Untuk mendukung pelaksanaan inisiatif ini, UN Women bekerja sama dengan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, PBB, dan mitra lainnya untuk menyelenggarakan dan mendorong masyarakat global untuk turut mengambil tindakan. Di wilayah Amerika Latin dan Karibia, khususnya di Argentina Kampanye UN dilakukan dengan menampilkan kesaksian penyintas kekerasan, di Brasil, 25 perempuan pembela HAM juga melakukan pembahasan ancaman terhadap perempuan, strategi perlindungan dan jaringan advokasi yang berhak didapatkan perempuan. Di wilayah Eropa dan Asia Tengah, peta interaktif yang menampilkan informasi femisida yang terjadi di Albania, Montenegro, dan Serbia diluncurkan di forum regional, Republik Moldova mengadakan pelatihan tentang cara melawan pelecehan seksual kepada pemuda dan pemudi, Di beberapa wilayah lain seperti di Afrika, Asia Tenggara, negara-negara Arab, dan lainnya juga diadakan kampanye

dalam bentuk kegiatan-kegiatan kreatif seperti pemutaran film, penampilan seni lukis, pameran foto, hingga *flash mob* yang ditujukan untuk meningkatkan perhatian masyarakat pada kegiatan peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan isu yang diangkat setiap tahunnya (<https://www.unwomen.org>)

Di Indonesia, Komnas Perempuan telah menjadi lembaga resmi yang berperan sebagai inisiator dan fasilitator dalam melaksanakan K16HAKTP di Indonesia sejak kegiatan ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 2001. Dalam rentang 16 hari masa kampanye, Komnas Perempuan secara aktif bergerak mengajak berbagai komponen masyarakat untuk membangun strategi pengorganisasian dan menyepakati agenda bersama untuk membangun solidaritas dengan didasarkan pada kesadaran bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran HAM, mendorong perlindungan yang lebih baik bagi penyintas, serta mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi sesuai kapasitasnya dalam upaya menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

2.3 Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (K16HAKTP)

2023 di Indonesia

Pada tahun 2023, Kampanye 16 HAKTP memiliki fokus pada urgensi untuk mendorong berbagai pihak, elemen masyarakat serta penegak hukum untuk mengenali peraturan, kebijakan, dan perundang-undangan yang melindungi perempuan korban kekekrasan. Tujuan dipilihnya tema tersebut adalah karena penerapan kebijakan dan Undang-Undang mengenai penghapusan kekerasan dan perlindungan bagi korban kekerasan masih banyak mengalami kendala dalam penerapannya di Indonesia. Temuan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa

perspektif Aparat Penegak Hukum (APH) tentang kekerasan seksual belum komprehensif sehingga masih terdapat kesenjangan dalam upaya penanganan dan pemulihan korban masih banyak ditemukan praktik-praktik penyelesaian kasus kekerasan seksual melalui *restorative justice* (keadilan restoratif). *Restorative justice* berfokus pada tindakan pemulihan kerugian yang dialami korban, tanggung jawab dari pelaku, dan perbaikan hubungan yang rusak akibat konflik. Praktik ini sudah dikenali masyarakat Indonesia, dimana penekanan dalam penyelesaian kasus didasarkan dengan membangun harmoni dan kebersamaan, bukan dengan pemidanaan pelaku, sehingga penyelesaian kasus kekerasan seksual dengan praktik ini dinilai kontroversial karena beresiko mencederai keadilan bagi pihak korban.

Melalui momentum 16 HAKTP di tahun 2023, Komnas Perempuan bersama Masyarakat Sipil mendorong partisipasi publik dalam penyebarluasan informasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan aturan hukum yang mengaturnya. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama rangkaian kegiatan kampanye antara lain:

1. Membuat rangkaian acara atau kegiatan di tingkat global, regional, nasional dan lokal untuk mengadvokasi strategi, program, dan sumber daya yang inklusif, komprehensif, dan berjangka panjang dalam mencegah Kekerasan seksual.
2. Melakukan kampanye online di media sosial seperti melalui seminar virtual, petisi, filter 16HAKTP, call to action online dan sebagainya.
3. Menggelar penggalangan dana untuk korban kekerasan seksual dan memberikan bantuan ke lembaga layanan pendamping korban.

4. Mengadakan konseling gratis baik offline maupun online dalam rangka memberikan dukungan kepada para perempuan penyintas
5. Menggelar pelatihan baik internal maupun eksternal organisasi (komunitas) untuk memperkuat sumber daya.
6. Menginisiasi percakapan publik dan pendidikan publik untuk mengenali berbagai aturan hukum yang memberikan perlindungan bagi korban kekerasan.
7. Mengadakan kampanye offline.
8. Mengadakan kampanye melalui media elektronik seperti Televisi dan sebagainya untuk kampanye secara serempak di waktu yang sama.
9. Mengeksplorasi pendekatan kreatif dan inovatif seperti melalui media fotografi, pameran, karya seni poster, lokakarya, instalasi bilik aman maupun edukasi di media digital, newsletter serta media cetak.
10. Meraih seluruh jaringan nasional dan institusi untuk mengenali, memahami kekerasan terhadap perempuan.
11. Membuat ruang-ruang ringan dan edukatif.
12. Mendorong Pemerintah untuk mengimplementasikan UU TPKS baik itu harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada baik ditingkat pusat dan daerah.

Dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan Komnas Perempuan dengan merangkul beragam kelompok sasarannya, Komnas Perempuan memiliki tujuan dan pesan yang antara lain adalah untuk Mengenali kekerasan terhadap perempuan dan hukum yang tersedia, Memberikan perlindungan dan pemulihan pada korban kekerasan, Melakukan bentuk perlawanan terhadap stigma perempuan korban

kekerasan, Mendorong pemahaman dan implementasi amanat Undang-Undang dari APH terhadap perempuan korban kekerasan, Serta melakukan penguatan solidaritas dukungan di berbagai wilayah.

2.4 Gambaran Peran Organisasi Perempuan di Indonesia Dalam Momentum

Kampanye 16 HAKTP 2023

Kampanye 16 Hari Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP) merupakan inisiatif global yang dimulai pada tahun 1991, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan berbasis gender dan mendukung upaya-upaya pencegahan serta penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Adapun Komnas Perempuan sebagai penyelenggara kegiatan ini pada tingkat nasional telah melakukan kolaborasi aktif bersama dengan berbagai organisasi masyarakat yang bergerak pada isu perempuan dalam pelaksanaan kampanye ini sejak pertama kali diadopsi pada tahun 2001. Dalam kegiatan kampanye ini, komunitas dan organisasi perempuan berperan krusial dalam mendorong tercapainya payung hukum yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan korban kekerasan seksual. Mereka tidak hanya terlibat dalam advokasi, tetapi juga dalam pendidikan publik, pengembangan layanan dukungan untuk korban, serta penyebaran informasi melalui media sosial untuk menjangkau masyarakat luas.

Selama kampanye 16 HAKTP, Komnas Perempuan bersama dengan jaringan komunitas dan organisasi perempuan mengadakan lebih dari 200 kegiatan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk mengunjungi daerah-daerah yang rawan kekerasan untuk berdialog dengan berbagai pihak terkait, seperti pendamping korban, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah. Dalam kegiatan ini,

organisasi-organisasi perempuan berperan dalam mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penanganan kekerasan seksual, seperti keterbatasan akses layanan kesehatan dan hukum bagi korban, serta upaya penguatan kapasitas lembaga layanan korban di tingkat lokal.

Secara spesifik pada kampanye 16 HAKTP di tahun pelaksanaan 2023, komunitas dan organisasi perempuan di Indonesia juga berkontribusi dalam mendorong pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang sangat dinantikan oleh banyak pihak sebagai instrumen hukum yang penting untuk memastikan hak-hak korban kekerasan seksual dapat terlindungi. Dengan disahkannya undang-undang tersebut, sosialisasinya di masyarakat juga digencarkan melalui berbagai strategi. Banyak komunitas dan organisasi yang beranggotakan perempuan dari lapisan masyarakat yang berbeda berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan, seperti kelompok mahasiswa, pelajar, teolog, aktivis sosial, dan lain-lain. Beberapa contoh komunitas dan organisasi lain yang bergerak pada isu perempuan yang rutin menunjukkan partisipasinya dalam kegiatan Kampanye 16 HAKTP Komnas Perempuan antara lain UN Women, Lingkar studi feminis, Womens March, KOHATI, Women Nations, Peruati, dan masih banyak lagi.